

B. ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN

1. ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN URUSAN WAJIB MELIPUTI BIDANG-BIDANG SEBAGAI BERIKUT :

a. Aspek Pelaksana Kebijakan Urusan Wajib Bidang Pendidikan

1. Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- a. Rasio Program Nasional yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya :
Jumlah urusan pendidikan sesuai dengan RKP tahun 2009 sebanyak departemen pendidikan nasional 1 (satu) urusan
Program, sementara pemerintah kabupaten murung raya melaksanakan 22 (dua puluh dua) program kegiatan bidang pendidikan sesuai RKA dan DPA tahun 2009.
- b. Standar Operasional Produser (SOP) yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas Pendidikan sebagai penjabaran Standar Operasional Procedure (SOP) ditetapkan sesuai masing-masing kegiatan di bidang dan sekretariat, dan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana APBN sepenuhnya berpedoman pada SOP yang ditetapkan oleh Pusat (Depdiknas)

2. Ketaatan Terhadap Peraturan Per Undang-undangan

PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN PERDA urusan pendidikan PERDA No. 10 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008 – 2028 dan PERDA No. 11 Tahun 2008 Tentang RPJM daerah Kabupaten Murung Raya tahun 2008-2013

3. Penataan Kelembagaan Daerah

a. Struktur jabatan dan eselonering yang terisi :

Struktur organisasi pada dinas pendidikan kabupaten murung raya sesuai dengan perda nomor : 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya mengacu pada PP no.41 Tahun 2007 telah terisi semua yaitu sebanyak 20 (dua puluh) formasi struktur yang terdiri dari esalon II, III, dan IV

b. Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya adalah jabatan fungsional yaitu, Pengawas Sekolah yang membantu bidang-bidang teknis melaksanakan dan mengevaluasi ketercapaian Program Nasional dan Program Daerah serta UPTD yang berada di Kecamatan-kecamatan yang membantu Bidang Pendidikan Formal dan Informal dalam melaksanakan tugasnya.



4. Pengelolaan Kepegawaian Daerah

- a. Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan :
semua jabatan yang tersedia telah terisi semua sesuai dengan struktur jabatan yang ada.
- b. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya :
Semua pejabat berpendidikan formal minimal sarjana (S.1) adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dari total 20 (dua puluh) orang dalam struktur jabatan yang ada.
- c. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan :
Semua pejabat telah memenuhi kepangkatan minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki jabatan tersebut adalah sebanyak 19 (sembilan belas) Orang dan 1 (satu) orang Plt.
- e. Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai :
Untuk tahun 2009 telah di alokasikan untuk peningkatan Kualifikasi S1, S2 bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.

5. Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya :
Dinas pendidikan Kabupaten Murung Raya telah memiliki dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, RKA dan DPA
- b. Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam renja SKPD :
Program urusan pendidikan yang tertuang dalam RKPD semuanya telah diakomodir dalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- c. Jumlah program Renja RKPD semua telah diakomodir dalam penyusunan RKA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.
- d. Jumlah program Renja RKPD yang tidak terakomodir dalam DPA – SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya.

6. Pengelolaan Keuangan daerah

Alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya tahun 2009 di prioritaskan bagi bidang pendidikan mengingat program kabupaten yaitu Mura Cerdas dan Mura Sehat Tahun 2013

7. Pengelolaan barang milik daerah

Aset Dinas pendidikan Kabupaten Murung Raya telah dilakuakn inventaris dan bidang tanah yang di kuasai sebagian besar telah dimanfaatkan untuk perkantoran dan fasilitas pendidikan.

8. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat

Fasilitas parasarana informasi cukup tersedia untuk memberikan informasi kepada masyarakat.



Tabel Rasio Program dan Kegiatan yang di laksanakan di bidang Pendidikan

No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
I	<p>1 SEKRETARIAT</p> <p>1 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <p>Kegiatan Pengadaan Jasa Surat Menyurat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa Administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 12. Penyediaan peralatan rumah tangga 13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14. Penyediaan bahan logistik kantor 15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 16. Penyediaan jasa pendukung tenaga administrasi/teknis perkantoran 17. Operasional 10 UPT dan BPLPTK Dinas Pendidikan <p>2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas operasional 3. Pengadaan peralatan rumah jabatan 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas 6. Pemeliharaan Fasilitas perangkat koneksi banwith Jardiknas 7. Pencetakan raport SD, SMP, SMA, dan SMK 8. Penyediaan sarana dan prasarana gedung UPT - BPLTPK <p>3 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulangan pegawai yang pensiun 2. Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas 3. Pemandahan tugas PNS <p>4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2. Pengembangan Sistem Nomor Induk Siswa Nasional 3. Peningkatan sistem pendataan JARDIKNAS (Jaringan Pendidikan Nasional) 	
No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
	4. Pengadaan Pakaian PDH (Lengkap) pegawai dinas pendidikan	

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan rapat koordinasi pengawas dan penilik di kabupaten/provinsi 6. Penetapan angka kredit kab/Prov 8. Penunangan kegiatan HUT RI dan HUT Kabupaten dan Pameran 9. Penghargaan kepada guru berprestasi 10. Diklat teknis pengelolaan ICT/JARDIKNAS 11. Seleksi Cerdas Cermat UUD 1945 Tingkat SMA 12. Pengiriman Olimpiade Saint tingkat SMA ke Provinsi 13. Beasiswa anak berprestasi ke kedokteran 14. Beasiswa percepatan kualifikasi guru di UNPAR 15. Jambore Guru di Tingkat Provinsi 16. Kajian analisis Menuju Mura CERDAS 2013 	
5	<p>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan Program kerja tahun 2009 dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2009 4. Penyusunan LAKIP 2008 5. Melaksanakan Penyusunan RKA - SKPD dan DPA – SKPD tahun 2009 6. Menyusun Renstra 7. Membuat VCD Visual Dokumenter Pendidikan di Kabupaten Murung Raya 8. Menyusun dan membuat profil pendidikan kabupaten murung raya tahun 2009 9. Menyusun Naskah Modul Pendidikan lingkungan Hidup 10 Kecamatan 10. Pengadaan Dokumen lelang dan pengumuman pelelangan 	
6	<p>POGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Jaringan Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 	
7	<p>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Penyusunan Kurikulum 2. Penyediaan Sumbangan Bantuan Operasional Sekolah (SBOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta SMA/MA, SMK 3. Pengembangan Konverhensif Teaching and Learning (CTL) 4. Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dan menggunakan teknologi 5. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 6. Lomba cerdas cermat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK 7. OOSN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA 8. Sosialisasi Wajib Belajar 9 Tahun di 10 Kecamatan 	
8	<p>PROGRAM PENINGKAT MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Gedung Diklat 2. Menyelenggarakan US/UN dan UASBN, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan SMK 2008/2009 3. Sertifikasi tanah sekolah 	
No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
	4. Memberikan bantuan dana untuk program penyetaraan D-II dan S-1 Guru	



	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bantuan wisuda bagi mahasiswa penyetaraan D-II dan S-1 Guru 6. Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Mahasiswa PGSD S-1, Ikatan dinas berasrama FKIP Unpar 7. Pemilihan Guru Berprestasi dan Guru Teladan 8. Melaksanakan Rakor dengan UPT Dinas, Kepala SLTP, SLTA se Murung Raya 9. Mengadakan pelatihan Pembuatan Karya Tulis Guru SD, SMP, SMA, dan SMK 10. Lomba Inovasi dan Kreativitas Guru SD, SLTP, dan SLTA 11. Penyediaan Lahan untuk inovasi dan kreativitas Guru SD, SLTP, dan SLTA 12. Penyediaan Lahan untuk Lokasi Pembangunan Politeknik 13. Study Kelayakan Persiapan Pembangunan Politeknik 	
9	<p>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 2. Sosialisasi Program Adiwiyata 3. Sosialisasi dan BOS dan SBOS 4. Kegiatan HARDIKNAS Upacara (apel) 5. Mengadakan bantuan pada HUT PGRI dan menyelenggarakan sosialisasi, seminar dan upacara 6. Biaya Operasional Dewan Pendidikan 7. Pendidikan dan Pelatihan Komite Sekolah 	
II	<p>BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN</p>	
1	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan peningkatan profesionalisme pengawas sekolah se Kabupaten Murung Raya 2. Peningkatan SDM Guru-guru dalam membentuk mentalis, standar teaching procedure dan pelayanan 3. Pembuatan analisis Kebutuhan guru tahun 2010 – 2014 4. Evaluasi Program Capaian Target Kinerja Pendidikan 5. Pembuatan Dokumen Ketersediaan Guru Tahun 2009 6. Peningkatan SDM Guru Bidang Mutu Pelajaran Bahasa Inggris SMP/SMA 	
2	<p>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Test Pengawas TK/SD/SMP/SMA 2. Melaksanakan Test Calon Kepala Sekolah 3. Mengikutsertakan Guru Bidang Study dalam Diklat Keluar Daerah 4. Diklat Calon Pengawas TK/SD/SMP/SMA 5. Dilat calon kepala sekolah 6. Pembinaan Sekolah Unggulan SD, SMP dan SMA 7. Peningkatan Mutu Tenaga Edukatif SD, SMP, SMA dan SMK 8. Pelatihan teknologi Informatika dan Komunikasi dalam pembelajaran 9. Sosialisasi Sertifikat Pendidik 	
No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
	10. Pendamping Quality Assurance (QA) Penjamin mutu	



III	3	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 1. Bantuan untuk kelompok kerja pendataan pendidikan (KK – DATADIK) BIDANG PENDIDIKAN TK/SD/SLB	
	1	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1. Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 2. Penyediaan dana untuk GOPTKI 3. Bantuan Operasional TK 10 Kecamatan 4. Meubelair Taman Pendidikan Makunjung Kec. Barito Tuhup Raya	
	2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN 1. Pembangunan ruang kelas sekolah 2. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, penjaga sekolah 3. Pembangunan sarana dan prasarana sekolah 4. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 5. Pengadaan Meubelair Sekolah 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah 7. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 8. Mengadakan Seleksi olimpiade MIPA SD/MI tingkat Kabupaten/Propinsi 9. Biaya supervisi pengawas TK/SD 10 Kecamatan 10. Menyediakan dana pendamping Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/MI (Sharing DAK)	
IV	3	PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah BIDANG PENDIDIKAN SMP/SMA/SMK	
	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1. Workshop Kepala SMP, SMA dan SMK	
	2	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN 1. Biaya Operasional SMP Terbuka 10 Kecamatan 2. Pengadaan Seleksi Olimpiade MIPA siswa SMP/MTs Tingkat Kabupaten/Provinsi	
V	3	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1. Pembangunan Rumah dinas Kepala sekolah 2. Penambahan-Penambahan Ruang Kelas 3. Pengadaan alat praktek dan peraga sekolah 4. Pengadaan Meubelair Sekolah 5. Sharing dana Blok Grant SMA 6. Sharing dana Blok Grant SMK 7. Pengembangan unit praktek lapangan siswa SMK Pertanian Kab. Murung Raya 8. Promosi dan keterampilan siswa 9. Biaya Operasional SSN SMA 10. Pembangunan Turap SMP – 1 Permata Intan	
		BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	
	No.	Program dan Kegiatan	Keterangan
	1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR 1. Pelatihan peningkatan profesionalisme penilik luar sekolah	



2	<p>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2. Pengadaan Alat Permainan Edukatif 3. Pengadaan Buku PAUD Non Formal 4. Penunjang kegiatan Tenaga Pendidik PAUD 5. Pengadaan Buku Laporan PAUD 6. Biaya Operasional PAUD Bina Bangsa 7. Pengadaan Sertifikat (Ijazah) PAUD 8. Penataan Halaman dan Pagar PAUD Bina Bangsa 	
3	<p>BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan non Formal 2. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal 3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 4. Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket A, B dan C Tingkat Kabupaten/Provinsi 	
4	<p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p>	



ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2009

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

URUSAN WAJIB : PENDIDIKAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MURUNG RAYA

ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	Program Nasional (yang melekat di kekentrian/LKPD) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	Program Nasional (RKP) Program Daerah (RKPD)	$\frac{11}{11} \times 100$	100%
	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah c/q departemen /LKPD	Keberadaan standard Operating Prosedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Dokumen Protap tata laksana	$\frac{1}{1} \times 100$	100%
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	Rasio Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap perda yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaks. PERMEN yg ada dibagi PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Daftar PERDA dilaksanakan oleh SKPD (Perda No. 11 Tahun 2008)	$\frac{1}{1} \times 100$	100%
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Kesesuaian Struktur Jabatan dengan PP Nomor 41/2007	Rasio Struktur Jabatan dan Eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi Jumlah jabatan yang harus ada x 100%	Struktur jabatan dan nama pejabat di SKPD	$\frac{20}{20} \times 100$	100%
		Keberadaan Jabatan Fungsional dalam Struktur Organisasi SKPD	ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Tupoksi SKPD		Ada, Yaitu Jabatan fungsional pengawas dan Pamong



ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelesaikan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan	Jumlah struktur jab. yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%	Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan, serta pangkat terakhir	$\frac{20}{20} \times 100$	100 %
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya	jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan, serta pangkat terakhir	$\frac{15}{20} \times 100$	75 %
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan, serta pangkat terakhir	$\frac{7}{20} \times 100$	35 %
		Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan, serta pangkat terakhir	$\frac{19}{20} \times 100$	95 %
	Upaya peningkatan kapasitas SDM	Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai	alokasi anggaran peningkatan kualitas SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%	Anggaran SKPD dan APBD	(Rp. 2.861.900.000 / Rp. 132.567.861.627 x 100%)	2,16 %



ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pemb. yang dimiliki oleh SKPD	Keberadaan dokumen perenc. pemb. Di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Renstra 2008-2013 Renja 2010 RKA 2010		Ada : 1.6 2.2 3.2
	Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPД	Jumlah Program RKPД yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD	jumlah program RKPД yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	Renja	$\frac{0}{13} \times 100\%$	0%
	Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	Jumlah Proram Renja SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPД yang tidak diakomodir dlm dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Renja	$\frac{0}{13} \times 100\%$	0%
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD	jumlah Prog. SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	DPA	$\frac{0}{13} \times 100\%$	0%



ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	DPA dan Laporan Keuangan	$\frac{132.567.861.627}{614.627.603.651} \times 100\%$	21,56 %
	Besaran belanja modal	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	DPA dan Laporan Keuangan	$\frac{52.245.322.500}{132.567.861.627} \times 100\%$	40 %
	Besaran belanja pemeliharaan	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	DPA dan Laporan Keuangan	$\frac{12.811.500.000}{132.567.861.627} \times 100\%$	1,609%
		Total belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	DPA dan Laporan Keuangan	$\frac{12.811.500.000}{52.245.322.500} \times 100\%$	24,5%
	Laporan keuangan SKPD	Keberadaan laporan keuangan SKPD (LRA, Neraca, CALK)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (LRA, Neraca, Calk)	DPA dan Laporan Keuangan Neraca, Calk		Komponen yang ada: 1. Neraca 2. LRA 3. CALK
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen aset SKPD	Keberadaan inventarisasi barang atau aset SKPD	ada atau tidak ada inventaris barang atau asset SKPD	Dokumen		ada
PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Penggunaan bidang tanah oleh SKPD	Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yang dikuasai SKPD	Jumlah tanah yang digunakan SKPD dibagi total bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%	Dokumen		
	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipatif masyarakat	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : - Papan Pengumuman - Pos Pengaduan - Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana informasi: Papan Pengumuman Pos pengaduan Leaflet	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	$\frac{4}{5} \times 100\%$	80%



ASPEK	FOKUS	IKK	Rumus	Jenis Data	Perhitungan	Capaian Kinerja
		- Mobil Keliling - Pengumuman di Mass Media	Mobil keliling Pengumuman di Mass media			
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	keberadaan survey kepuasan masyarakat	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		Tidak Ada

